

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, 2002, *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Muliawan, Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1985, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Salindeho, John, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salle, Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan, Carolina Sitepu, dan Herawan Sauni, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibawanti, Erna Sri dan R. Mujiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 j.o. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 j.o. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 j.o. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 jo. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

C. Jurnal dan Penelitian

- Christina Octavia, 2012, “Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum (Tinjauan Yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 6070-HGB.32.75/300/XII/2010)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Dwi Fratmawati, 2006, “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Semarang”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Githa Angela Sihotang, Pujiyono dan Nabitatus Sa’adah, 2017, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”, Jurnal, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yuniar Kurniawaty, 2016, “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (*The Use Of Discretion In The Formation Of A Legal Product*)”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Gorontalo.
- Martina Desy Haripiana, 2016, “Peran Notaris Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Sekadan)”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mira Novana Ardani, 2019, “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sonny Djoko Marlijanto, 2010, “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang)”, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tatu Afifah, 2010, “Analisis Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten, Di Kabupaten Serang Studi Terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/Pn.Srg).”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Urip Santoso, 2010, “Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta”, Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya.